**ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PERKARA ISBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA BITUNG”**

**(Studi Kasus Perkara Nomor 66/Pdt.P/2019/PA. Bitg)**

****

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (SH)

Program Studi Ahwalul Al-Syaksiyah Pada Fakultas Syariah

Oleh:

**Rizal Lahati**

NIM. 16.1.1.018/AS

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO**

**2020**

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizal Lahati

NIM : 16.1.1.018

Tempat/Tgl. Lahir : Bitung, 07 Nopember 1998

Program Studi : Ahwalul Al-Syaksiyah (AS)

Fakultas : Syari’ah

Alamat : Kelurahan Girian Indah, Kecamatan Girian, Kota Bitung

Judul : Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim terhadap Perkara Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Bitung” (Studi kasus perkara nomor 66/Pdt.P/2019/pa. Bitg)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Manado, 24 Mei 2020 Penulis,

Rizal Lahati,

NIM. 16.1.1.018

**PERSETUJUAN PEMBIMBING DAN PENGUJI**

Pembimbing dan penguji penulisan Skripsi saudari Rizal Lahati, **NIM : 16.1.1.018,** mahasiswa program studi **Ahwalul Syakhsiyah (AS)** pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, setelah dengan meneliti dan mengoreksi Skripsi yang bersangkutan dengan judul **“Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim terhadap Perkara Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Bitung” (Studi kasus perkara nomor 66/Pdt.P/2019/pa. Bitg)”.** Karenanya pembimbing I dan pembimbing II serta penguji I dan penguji II memandang bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat Ilmiah dan dapat disetujui untuk menempuh Ujian/Munaqasyah Skripsi.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya. **PEMBIMBING I:**

**Dr. H. Hasyim Sofyan Lahilote, MH.** (…………………………..)

**PEMBIMBING II:**

**Ramli, S.Ag., MH., M.Phil** (…………………………..)

**PENGUJI I:**

**Dr.Suprijati Sarib, M.Si** (…………………………..)

**PENGUJI II:**

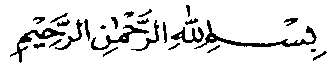
**Dr. Hj. Salma, M.Hi**  (…………………………..)

Manado, 24 Mei 2020 Diketahui oleh:

Kaprodi Ahwalus Syakhsiyah. Fakultas Syariah,

**Mufti Baso Alwi, M.Ag NIP.197207092008011005**

**KATA PENGANTAR**

****

Puji syukur kehadirat Allah swt., Tuhan Yang Maha Segala-galanya, karena atas izin dan kuasa-Nya, Skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim terhadap Perkara Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Bitung” (studi kasus perkara nomor 66/Pdt.P/2019/Pa. Bitg) dapat diselesaikan dengan baik. Semoga atas izin-Nya skripsi ini dapat bermanfaat bagi lembaga pendidikan, masyarakat, maupun peneliti selanjutnya. Tak lupa pula sebagai umat Rasulullah saw., patut menghaturkan salawat dan salam, dan para keluarga serta sahabatnya, semoga rahmat yang Allah telah limpahkan kepadanya akan sampai kepada seluruh umatnya.

Dalam penulisan skripsi ini, bermacam-macam tantangan dan hambatan yang dialami oleh penulis, tetapi berkat pertolongan Allah swt., dan motivasi serta dukungan dari berbagai pihak akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan meskipun secara jujur bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritikan yang sifatnya membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini dan tidak lupa pula menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih terutama kepada yang terhormat:

1. Sartje Kadir dan Alm. Ayah Udin Lahati, selaku orangtua tercinta yang telah membesarkan dan mengasuh dengan penuh cinta kasih sehingga penulis bisa sampai dalam tahap ini, yang selalu memberikan dorongan dan motivasi serta do’a disetiap sujud mereka sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Delmus Puneri Salim, S.Ag., M.A., M.Res., Ph.D selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.
3. Dr. Ahmad Rajafi, M.HI selaku Wakil Rektor I, Dr. Radlyah H. Jan, SE., M.Si selaku Wakil Rektor II, dan Dr. Musdalifah, M.Si., M.Psi selaku Wakil Rektor III Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.
4. Dr. Hj. Salma, M.Hi, selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.
5. Dr. H. Hasyim Sofyan Lahilote, MH., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Dr. Naskur M.Hi selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.
6. Mufti Baso Alwi, M.Ag selaku ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam juga yang senantiasa memberikan nasihat dan arahan kepada penulis sejak semester satu sampai dengan semester akhir hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
7. Dr. H. Hasyim Sofyan Lahilote, MH dan Ramli, S.Ag., MH., M.Phil, selaku pembimbing I dan II, Dr.Suprijati Sarib, M.Si dan Dr. Hj. Salma, M.Hi selaku penguji I dan II yang sudah membimbing, mengarahkan dan juga banyak membantu penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik
8. Dr. H. Hasyim Sofyan Lahilote, MH selaku Penasehat Akademik
9. Dosen-dosen IAIN Manado, khususnya dosen-dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu
10. Teddy Lahati, Endang Thalib, Tezar Lahati selaku kakak yang senantiasa memberikan motivasi dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Adik-Adik Mawaddah Lahati dan Khoirul Dzaki Lahati yang telah memberi semangat serta memberi motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini
12. Muhammad Fahrudin, Safrullah Nga’u, Nazamudin Mahengkeng selaku teman seangkatan yang sejak awal telah membantu penulis skripsi ini
13. Teman-teman Kelas Akhwalul Syaksiyah 2016, Dan Teman Posko 8 KKN IAIN Manado dan IAIN Ternate 2020
14. Dan seluruh keluarga, sahabat, rekan yang sudah membantu penulis dalam penyelesaian studi terutama dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu

Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semoga segala partisipasinya akan memperoleh imbalan yang berlipat ganda dari Allah swt

Manado, 24 Mei 2020 Penulis,

Rizal Lahati

NIM. 16.1.1.018

**DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL i

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

KATA PENGANTAR iv

DAFTAR ISI vii

ABSTRAK ix

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang 1
2. Rumusan Masalah 9
3. Definisi Operasional 9
4. Ruang Lingkup Penelitian 10
5. Tinjuan Pustaka 13

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN

1. Pengertian Pernikahan 19
2. Rukun dan Syarat Pernikahan 20
3. Larangan Pernikahan 24
4. Isbat Nikah 25
5. Pencatatan Perkawinan 34
6. Tujuan Pencatatan Perkawinan 35
7. Legalisasi Pernikahan 37
8. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan 39

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

1. Jenis Penelitian 42
2. Lokasi Penelitian 42
3. Metode Pendekatan 43
4. Metode Pengumpulan Data 43
5. Tujuan Penelitian 45
6. Kegunaan Penelitian 45

BAB IV PERTIMBANGAN HAKIM DI PENGADILAN AGAMA BITUNG DALAM PERKARA PENETAPAN ISBAT NIKAH NOMOR 66/Pdt.P/2019/PA.Btg

1. Deskripsi Pengadilan Agama Bitung 47
2. Deskripsi Penetapan isbat nikah di Pengadilan Agama Bitung

Nomor 66/Pdt.P/2019/PA.Bitg 52

1. Analisis Yuridis terhadap Penetapan Isbat Nikah Pengadilan

Agama Bitung Nomor Perkara 66/Pdt.P/2019/PA.Bitg 62

BAB V PENUTUP

1. Kesimpulan 71
2. Saran 72

KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

**ABSTRAK**

**Nama Penyusun : Rizal Lahati**

**N.I.M : 16.1.1.018**

**Judul Skripsi : “Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim terhadap Perkara Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Bitung” (studi kasus perkara nomor 66/Pdt.P/2019/Pa. Bitg)**

Skripsi ini membahas tentang Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim terhadap Perkara Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Bitung (Studi kasus perkara Nomor 66/Pdt.P/2019/Pa. Bitg). Kajian ini dilatar belakangi oleh adanya pernikahan yang tidak tercatatkan. Skripsi ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan Bagaimana dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bitung dalam menetapkan permohonan isbat nikah terhadap perkara 66/Pdt.P/2019/PA Bitg? Permasalahan tersebut dibahas dengan menggunakan Metode Yuridis Empiris (*Field research*), Penelitian yang menggunakan yuridis empiris berarti penelitian yang menekankan pada fakta-fakta yang nyata di lapangan. Hasil dari penelitian ini adalah pertimbangan hukum dalam penetapan Nomor 66/Pdt.P/2019/PA.Bitg di atas memang sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meski demikian, penulis berpendapat bahwa hakim kurang tegas dalam memberikan pertimbangan hukum, majelis hakim tidak mencantumkan pasal 7 ayat 3 serta tidak menggali fakta janda cerai mati Pemohon II. Penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan materi bagi pendidik dan orang tua dalam masalah dasar-dasar pendidikan Islam.

**ABSTRACT**

**Name : Rizal Lahati**

**N.I.M : 16.1.1.018**

**Thesis Title : “Judicial Analysis of Judges Consideration of Isbat Marriage Cases In Bitung Religious Court” (Case Study Number 66/Pdt.P/2019/Pa. Bitg)**

This thesis discusses the Judicial Analysis of Judge Considerations on Marriage Isbat Cases in the Bitung Religious Court (Case Study Number 66/Pdt.P/2019/Pa. Bitg). This study is motivated by a marriage that is not registered. This thesis is intended to answer the question What is the basis for the judgment of the Bitung Religious Court judges in determining the marriage request for a case 66/Pdt.P/2019/PA Bitg? These problems are discussed using the Empirical Juridical Method (*Field research*), Research that uses empirical jurisdiction means research that emphasizes real facts in the field. The results of this study are legal considerations in stipulation of Number 66/Pdt.P/2019/PA.Bitg above are indeed in accordance with applicable regulations, however, the authors argue that the judge is less assertive in providing legal considerations, the panel of judges does not include articles 7 paragraph 3 and did not explore the facts of the divorcee of the Petitioner II. This research is expected to be material for educators and parents in the problems of the basics of Islamic education.

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

*A. Latar Belakang*

Perkawinan di Indonesia baru dapat dikatakan perbuatan hukum apabila dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku secara positif. Ketentuan hukum yang mengatur mengenai tatacara perkawinan terdapat pada Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dengan adanya Undang-undang tersebut maka perkawinan dapat menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum yang ditimbulkan adalah akibat yang dapat mempunyai hak untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum. Kemudian pada pasal 2 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa suatu perkawinan baru dapat dikatakan perkawinan yang sah menurut hukum apabila perkawinan itu dilakukan dengan menurut masing-masing agama dan kepercayaan. Pada ayat 2 Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa menentukan tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.[[1]](#footnote-1)

Peraturan perundang-undangan di Indonesia mengatur betapa pentingnya pencatatan perkawinan dan satu-satunya alat bukti bagi adanya perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah. Dengan kewajiban berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka secara logis tidak ada jalan keluar bagi yang melaggar ketentuan ini untuk menyelesaikan permasalahannya dikemudian hari. Namun di sisi lain perundangan-undangan memberikan kemudahan bagi mereka yang tidak dapat membuktikan adanya perkawinan mereka dengan alat bukti akta nikah untuk menyelesaikan permasalahan perkawinan mereka melalui Instansi Pemerintah yang resmi yaitu di Pengadilan Agama. Sesuai dengan dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 7 ayat 2 dan 3 menyatakan bahwa, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

Pengadilan Agama dalam pelaksanaan kekuasaannya, merujuk kepada Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, yang mengatur tentang susunan dan kekuasaan badan-badan peradilan dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, mengatur tentang kedudukan dan kekuasaan Pengadilan Agama.

Pengadilan Agama merupakan lembaga yang mempunyai kewenangan menyelesaikan kasus perkara di bidang keperdataan, baik secara voluntair maupun kontentius. Perkara voluntair adalah perkara yang sifatnya permohonan di dalamnya tidak mengandung sengketa, sehingga tidak ada lawan. Sedangkan perkara kontentius adalah perkara gugatan/permohonan yang di dalamnya mengandung sengketa antara pihak-pihak.[[2]](#footnote-2)

Hakim merupakan pemegang keputusan yang sangat penting dalam menolak atau mengabulkan permohonan/gugatan perkara. Dasar hukum yang digunakan oleh hakim disini menjadi pembahasan yang sangat penting dikaji. Dengan mengetahui dasar hukumnya dapat diketahui layak-tidaknya suatu perkara diputus.

Pertimbangan hakim adalah kerangka berfikir dasar permikiran yang digunakan hakim dalam memutuskan suatu perkara (ratio decidendi). Titik tolak pertimbangan hakim pada pendapat para doktina, alat bukti dan yurispudensi. Pertimbangan hakim harus disusun secara logis, sistematis, saling berhubungan, dan saling mengisi. Pertimbangan hakim secara kongkrit dituangkan sebagai analisis, argumentasi, pendapat dan kesimpulan hakim.

Dalam memutuskan suatu perkara seorang hakim harus mempertimbangkannya dengan baik dan benar maka pertimbangan hakim dalam suatu perkara harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Fakta yang terungkap selama persidangan belangsung
2. Aspek Yuridis, Filosofis dan Sosiologis.

Keberadaan sebuah pertimbangan hakim sangat menentukan suatu putusan hakim karena putusan hakim adalah produk hakim yang mana pertimbangan tersebut akan menentukan baik atau tidaknya sebuah putusan tersebut karena tanpa ada pertimbangan yang komprehansip maka proses peradilan dapat terjerumus pada peradilan yang bias atau bahkan akan menimbulkan *the death of justice* (keadilan yang mati) serta dapat juga menimbulkan the death of commonsense (matinya akal sehat).[[3]](#footnote-3)

Sehingga dengan adanya pertimbangan tersebut hakim juga dalam memutuskan perkara isbat nikah tersebut harus hati-hati. Adapun Isbat nikah itu sendiri merupakan penggabungan dua kata, yang terdiri dari kata *itsbat* dan *nikah*. Kedua kata itu berasal dari dua Bahasa Arab, yakni dari akar kata *”atsbata” (الثبات)* artinya menetapkan/penetapan.[[4]](#footnote-4) Sementara pernikahan bermakna الوطء berarti *“setubuh”* yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan.

Gabungan kata isbat dan nikah sebagai kata majemuk ini, menimbulkan pengertian baru yaitu penetapan nikah yang merupakan produk Pengadilan Agama berdasarkan permohonan/gugatan dari pihak yang berkepentingan. Pendapat tersebut sejalan dengan konsep yang ditemukan oleh Iskandar Ritonga (Dosen UIN Sunan Ampel) yang mengatakan, bahwa istbat nikah ialah sebuah permohonan yang diajukan oleh pemohon kepada Pengadilan Agama dengan maksud agar suatu perkawinan (nikah yang tidak dicatatkan atau tidak mempunyai akta nikah) dinyatakan sah berdasarkan penetapan Pengadilan Agama tersebut.

Istilah nikah itu ditemukan secara eksplisit dalam Kompilasi Hukum Islam, seperti yang dimuat dalam pasal 7 ayat (2) yang menyatakan bahwa dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Kemudian dalam pasal 7 ayat (3) dijelaskan istbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama tersebut. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam ini merupakan pengembangan dari maksud angka 5 penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa untuk menjamin kepastian hukum, maka perkawinan berikut segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku, yang dijalankan menurut hukum yang telah ada adalah sah.

Adapun dalam Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan berakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, yang menjelaskan bahwa Kompetensi Absolute/Mutlak Pengadilan Agama di antaranya yaitu Isbat nikah.

Timbulnya Isbat dikarenakan sebuah perkawinan yang secara hukum positif tidak tercatat dalam KUA setempat. Dalam Dasar hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia Perkawinan di atur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pada Pasal 1 yang berbunyi: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Adapun tujuannya dalam islam yaitu untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana terdapat dalam QS. An-Nisa’ : 1

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَاۤءً ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ تَسَاۤءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا

“Wahai manusia, Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.” (Qs. An-Nisa’ : 1)[[5]](#footnote-5)

Dan juga pada QS. Adz-Dzariyat : 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.(QS. Adz-Dzariyat : 49)[[6]](#footnote-6)

Untuk calon pasangan yang hendak melakukan perkawinan hendaknya memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan itu sendiri, Seperti Rukun dan juga Syarat sah Perkawinan. Dalam tatanan Hukum Negara Setiap Perkawinan Wajib Hukumnya untuk dicatatkan sebagaimana yang tertuang Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat (2): “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Dan Juga tertuang dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 5 yang berbunyi:

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954.

Dan Juga Penjelasan selanjutnya yaitu terdapat dalam Pasal 6 KHI yaitu:

1. Untuk memenuhi ketentuan pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
2. Perkawinan yang dilangsungkan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.[[7]](#footnote-7)

Meskipun pencatatan pernikahan hukumnya wajib dalam undang-undang kita, tetapi pada kenyataannya masih banyak terjadi pernikahan dengan tidak mencatatkan pernikahannya. Pernikahan yang tidak dicatat tersebut mengakibatkan pernikahan tersebut disebut dengan pernikahan siri. Faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan siri ada banyak. Apapun faktornya tersebut yang dinamakan pernikahan siri itu dianggap legal oleh negara dan tidak mempunyai kekuatan hukum dikarenakan tidak mempunyai bukti nyata seperti akta nikah yang meyakini mereka bahwa suami isteri yang sah.

Berkenaan dengan pelaksanaan kekuasaan kehakiman, Pengadilan merupakan penyelenggara peradilan. Pengadilan adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian, peradilan agama dapat dirumuskan sebagai kekuasaan negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara.

Kekuasaan kehakiman adalah salah satu pelaksana kekuasaan Negara sebagaimana termaktub dalam Undang-undang Dasar 1945. Badan kekuasaan kehakiman diatur dalam Bab IX, terdiri dari dua pasal yaitu pasal 24 dan 25. Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, Pengadilan Negara dalam sistem Peradilan Nasional Indonesia yang bertugas, menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama diantara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, zakat, infak, shodaqoh, dan ekonomi syariah.

Pada Pengadilan Agama Bitung sepanjang tahun 2019 terdapat 388 perkara yang diterima. 387 perkara berhasil diputus. Dan diantara perkara tersebut terdapat Perkara Isbat Nikah Sebanyak 102 Perkara, Dengan rincian 76 Di Kabul, Tolak 1, Cabut 9, dan Gugur 16. Isbat Nikah menarik untuk diteliti karena merupakan suatu proses penetapan pernikahan yang sebelumnya tidak tercatat atau tidak dilakukan didepan Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA). Selama ini pernikahan yang tidak tercatatkan belum mempunyai kepastian hukum dikarenakan belum adanya bukti otentik yang mendukungnya. Dengan adanya Isbat Nikah ini diharapakan permasalahan suami-isteri serta pihak-pihak yang berkaitan dengannya dapat mendapat haknya sebagaimana mestinya.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh isbat nikah tersebut yang dalam hal ini secara komperhensip penulis menuangkannya kedalam bentuk karya skripsi yang berjudul: “**Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Bitung**” (Studi Kasus Perkara Nomor 66/Pdt.P/2019/PA.Bitg).

*B. Rumusan Masalah*

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bitung dalam menetapkan permohonan isbat nikah terhadap perkara 66/Pdt.P/2019/PA Bitg?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap penetapan isbat nikah di Pengadilan Agama Bitung dalam perkara 66/Pdt.P/2019/PA.Bitg ?

*C. Definisi Operasional*

Definisi Operasioal

Analisis Yuridis adalah menguraikan norma-norma ketetapan mengenai Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat 3 tentang isbat nikah.

Pertimbangan hakim adalah kerangka berfikir atau dasar permikiran yang digunakan hakim dalam memutuskan suatu perkara (ratio decidendi). Titik tolak pertimbangan hakim pada pendapat para doktina, alat bukti dan yurispudensi. Pertimbangan hakim harus disusun secara logis, sistematis, saling berhubungan, dan saling mengisi.[[8]](#footnote-8)

Kata “Isbat“ dalam bahasa arab berarti, penyungguhan, penetapan, penentu dan apabila dikaitkan dengan kata “nikah“, maka kata “Isbat Nikah“ akan berarti penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah, hal ini bisa terjadi karena nikah kemungkinan telah dilakukan beberapa waktu, minggu atau bulan dan bahkan tahun yang telah lalu, maka peraturan tentang Isbat nikah ini merupakan peraturan yang dibuat atas dasar adanya pernikahan yang pernikahan yang hanya dilangsungkan hanya dengan mengikuti ajaran agama atau tidak dicatatkan oleh pengawai pencatat nikah yang berwenang.[[9]](#footnote-9)

1. ***Ruang Lingkup Penelitian***

Dan untuk Ruang lingkup penelitian ini penulis mengambil batasan tentang perkara yang akan diteliti di Pengadilan Agama Bitung. Perkara yang akan diteliti pada tahun 2019 yaitu Nomor 66/Pdt.P/2019/PA Btg, yang akan disajikan ditulisan ini.

Berkaitan dengan tulisan ini, penulis mengambil contoh beberapa yang berkaitan dengan judul ini akan tetapi mempunyai letak perbedaan yang akan di sajikan.

1. Skripsi dari Ilham: “Penyelesaian Perkara Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A” Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar

Rumusan masalahnya:

1. Faktor yang menjadi alasan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Watampone?
2. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim dalam penyelesaian Isbat Nikah di Pengadilan Agama Watampone
3. Penyelesaian Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Watampone

Perbedaan yang membedakan penulis dengan judul yang pertama ini yaitu berkaitan dengan lokasi penelitiannya, dalam rumusan masalah mempertanyakan faktor yang menjadi alasan permohonan isbat nikah, dan juga Isbat Nikah yang di sajikan hanya secara umum saja tidak fokus ke suatu perkara yang lebih signifikan.

1. Skripsi dari Muhammad Imron: “Isbat Nikah Terhadap Nikah Siri Pasca Tahun 1974 (Studi Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 0076/Pdt.P/2014/PA.SAL) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga

Rumusan Masalahnya:

1. Mengapa permohonan isbat nikah terhadap nikah siri pasca tahun 1974 pada permohonan Nomor 0076/Pdt.P/2014/PA.SAL dikabulkan?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum majelis hakim dalam mengabulkan isbat nikah pada permohonan Nomor 0076/Pdt.P/2014/PA.SAL?

Letak perbedaaan yang disajikan Penulis dengan Skripsi ini yaitu, Lokasi Penelitian yang membedakannya, yang berikut dalam hal rumusan masalanya mempertanyakan suatu perkara dikabulkan. Itu saja letak perbedaannya.

1. Skripsi dari M. Fajar Falah: “Proses Penetapan Isbat Nikah Terhadap Perkara Contensious Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 0234/Pdt.G/2015/PA.Tnk) Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.

Rumusan Masalahnya:

1. Bagaimana proses penetapan itsbat nikah terhadap perkara *contensious* dalam perspektif hukum Islam
2. Mengapa penetapan isbat nikah terhadap perkara *contensious* diperlukan
3. Apa akibat hukum dari putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor: 0234/Pdt.G/2015/PA.Tnk tentang isbat nikah

Letak perbedaaan yang disajikan Penulis dengan Skripsi ini yaitu, Lokasi Penelitian yang membedakannya, yang berikut dalam hal Akibat hukum yang di timbul dari putusan tersebut. Itu saja letak perbedaannya.

1. Skripsi dari Muh Riswan: “Penetapan Isbat Nikah Massal oleh Pengadilan Agama Makassar” Universitas Hasanuddin Makassar.

Rumusan Masalahnya:

1. Bagaimana pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam memutus perkara itsbat nikah terhadap nikah siri yang terjadi setelah tahun 1974 pada penetapan itsbat nikah massal oleh Pengadilan Agama Makassar?
2. Bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Makassar mengenai dampak yang terjadiserta solusi yang diberikanketika permohonan itsbat nikah terhadap nikah sirri yang terjadi setelah berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 dikabulkan?

Letak perbedaaan yang disajikan Penulis dengan Skripsi ini yaitu, Lokasi Penelitian yang membedakannya, yang berikut skirpsi diatas lebih condong kepada kasus isbat nikah terhadap nikah siri setelah berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 dikabulakn. Itu saja letak perbedaannya.

*D. Tinjuan Pustaka*

Kajian kepustakaan pada penelitian ini akan membuat beberapa pengertian pernikahan siri itu sendiri dan juga isbat nikah. Adapun beberapa pengertian yang secara garis besar yang akan dibahas sebagai berikut:

Pertimbangan Hakim

Dalam mempertimbangankan dari aspek syarat-syarat sahnya perkawinan baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku, maka hakim yang ada di Pengadilan Agama menggunakan pertimbangan hukumnya dari Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14-44 Kompilasi Hukum Islam yang pasal-pasal tersebut mengatur tentang keabsahan perkawinan dan kewajiban pendaftarannya, rukun dan syarat perkawinan, mahar, larangan kawin. Dengan memandang bahwa pernikahan telah memenuhi alasan hukum, maka majelis hakim Pengadilan Agama menimbangkannya dengan melihat pasal 2 ayat (2) dan Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 4 dan Pasal 7 huruf (e) serta pasal 99 Kompilasi Hukum Islam.

Dari berbagai pasal yang dipakai oleh majelis hakim yang ada di Pengadilan Agama dalam mempertimbangkan perkara Isbat nikah, hanya pasal 7 ayat (1) sampai (3) yang semestinya yang menjadi dasar terpenting dan menurut penulis hanya pasal ini yang memberi petunjuk yang begitu jelas, yaitu perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan Akata Nikah, dapat diajukan Isbat nikahnya ke Pengadilan Agama Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama.

Pengertian, Dasar Hukum Isbat Nikah dan Tata cara melakukan Isbat Nikah

Isbat nikah berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari isbat dan nikah. Kata ثا بتا *“tsaabitaan”* yang merupakan masdar atau asal kata dari ثبتا *“tsabtaan”* yang memiliki arti “menetapkan”, dan kata حا ق *“haakun”* yang berasal dari kata حقن *“haknun”* yang memiliki arti “saling menikah”, dengan demikian kata “isbat nikah” memiliki arti yaitu “penetapan pernikahan”. Sedangkan nikah adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizan* antara seorang laki-laki dengan perempuan sebagai suami isteri dengan terpenuhinya berbagai persyaratan dalam rangka mentaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah Isbat nikah dalam bahasa Indonesia dikenal dengan sebutan isbat nikah yang diartikan dengan pengukuhan dan penetapan perkawinan melalui pencatatan dalam upaya mendapatkan pengesahan suatu perkawinan menurut hukum yang berlaku.[[10]](#footnote-10)

Pada dasarnya isbat nikah adalah penetapan atas perkawinan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam yaitu sudah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Tetapi pernikahan yang terjadi pada masa lampau ini belum atau tidak dicatatkan kepejabat yang berwenang, dalam hal ini pejabat KUA (Kantor UrusanAgama) yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

Isbat nikah pada mulanya merupakan solusi atas diberlakukannya Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2) yang mengharuskan pencatatan perkawinan, karena sebelum itu, banyak perkawinan yang tidak dicatatkan, tetapi dapat dimintakan isbat nikahnya kepada Pengadilan Agama. Kewenangan mengenai perkara isbat nikah bagi Pengadilan Agama adalah diperuntukkan bagi mereka yang melakukan perkawinan dibawah tangan sebelum berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974.

Di dalam Pasal 64 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama adalah sah yang dimaksud tentu termasuk isbat nikah atau pengesahan nikah. Itsbat nikah*/*pengesahan nikah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan terakhir Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 dan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan terakhir Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 , yaitu “Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijalankan menurut peraturan yang lain”.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam juga dapat dilihat dalam Pasal 7 ayat 2, 3, dan 4. Itsbat nikah di Indonesia baru ada setelah lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.[[11]](#footnote-11)

Pada pasal 7 ayat (3) berbunyi: itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:[[12]](#footnote-12)

1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
2. Hilangnya Akta Nikah
3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974
5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974

Adapun tata cara atau prosedur dalam melakukan permohonan isbat nikah sama halnya dengan prosedur yang ditempuh dalam mengajukan perkara perdata.

Adapun prosedur yang harus ditempuh oleh pemohon itsbat nikah antara lain:[[13]](#footnote-13)

1. Datang dan Mendaftar ke Kantor Pengadilan Setempat

Yaitu dengan mendatangi kantor Pengadilan Agama di wilayah setempat, membuat surat permohonan isbat nikah dengan sendiri. Apabila tidak bisa membuat bisa meminta bantuan kepada Pos Bakum (Pos Bantuan Hukum) yang ada di Pengadilan tersebut.

1. Membayar Panjar Biaya Perkara

Membayar biaya perkara. Dan apabila tidak mampu langsung mengajukan prodeo atau perkara yang secara cuma-cuma alias gratis.

1. Menunggu Panggilan Sidang dari Pengadilan

Pengadilan akan mengirim Surat Panggilan yang berisi tentang tanggaldan tempat sidang kepada Pemohon dan Termohon secara langsung kealamat yang tertera dalam surat permohonan.

1. Menghadiri Persidangan

Datang ke Pengadilan sesuai dengan tanggal dan waktu yang terter adalam surat-surat panggilan. Pada sidang pertama membawa dokumen seperti surat panggilan persidangan, fotocopy formulir pendaftaran yang di isi. Selanjutnya hakim akan memberitahukan kepada Pemohon/Termohon yang hadir dalam sidang kapan tanggal dan waktu sidang berikutnya.

Untuk sidang kedua dan seterusnya, ada kemungkinan Pemohon harus mempersiapkan dokumen dan bukti sesuai dengan permintaan hakim. Dalam kondisi tertentu, hakim akan meminta Pemohon menghadirkan saksi-saksi yaitu orang yang mengetahui pernikahan Pemohon diantaranya wali nikah dan saksi nikah, atau orangorang terdekat yang mengetahui pernikahan Pemohon.

1. Putusan/Penetapan Pengadilan

Jika permohonan Pemohon dikabulkan, Pengadilan akan mengeluarkan putusan/penetapan itsbat nikah. Salinan putusan/penetapan itsbat nikah akan siap diambil dalam jangka waktu setelah 14 hari sidang terakhir. Setelah mendapatkan salinan putusan/penetapan tersebut, Pemohon bisa meminta KUA setempat untuk mencatatkan pernikahan Pemohon dengan menunjukkan bukti salinan putusan/penetapan pengadilan tersebut (PEKKA, 2012: 4-5).

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN

# Pengertian Pernikahan

Melihat aturan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. pengertian pernikahan ialah: “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketentuan Yang Maha Esa”.

Menurut Sajuti Talib, pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyatuni, kasih mengasihi, tentram dan bahagia. Sedangkan menurut Imam Syafi’I, pernikahan adalah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita.[[14]](#footnote-14)

Dengan demikian pernikahan menurut hukum Islam pada prinsipnya merupakan ibadah dalam rangka mentaati perintah Allah SWT. hal ini mengisyaratkan bahwa pernikahan tidak hanya sekedar ikatan antara seorang pria dengan wanita untuk membentuk rumah tangga guna memenuhi naluri kebutuhan duniawi, melainkan juga dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan ukhrowi (akhirat) dikemudian hari.[[15]](#footnote-15)

# Rukun dan Syarat Pernikahan

Pernikahan adalah suatu perbuata hukum, oleh karena itu mempunyai akibat hukum. Adanya akibat hukum, penting sekali kaitnaya dengan sah tidaknya perbuatan hukum. Oleh karena itu, sah tidaknya suatu pernikahan ditentukan oleh hukum yang berlaku (hukum positif), yaitu berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi: “pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.[[16]](#footnote-16) sedangkan menurut pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, bahwa pernikahan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.[[17]](#footnote-17)

Dari ketentuan diatas dapat diketahui bahwa Undang-Undang pernikahan menitik beratkan sahnya pernikahan pada dua unsur, yaitu; pernikahan harus dilaksanakan sesuai dengan syarat dan prosedur yang ditentukan oleh Undang-Undang (hukum negara) dan hukum agama. Keikutsertaan pemerintah dalam kegiatan pernikahan adalah dalam hal menyangkut proses adminitratif, di mana pernikahan harus dicatatkan sebagaimana dimuat dalam dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.[[18]](#footnote-18)

Sedangkan Kompilasi Hukum Islam menegaskan dalam pasal 4 bahwa pernikahan itu sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU no. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Kemudian rukun dan syarat pernikahan juga diatur dalam Pasal 14 sampai pasal 38 Kompilasi hukum Islam sebagai berikut:

Pasal 14

Untuk melakukan pernikahan harus ada:

* 1. Calon suami;
  2. Calon istri;
  3. Wali nikah;
  4. Dua orang saksi;
  5. Ijab dan qabul.

Pasal 15

1. Untuk kemaslakhatan keluarga dan rumah tangga, pernikahan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang- kurangnya berumur 16 tahun.
2. bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapati izin sebagai mana yang di atur dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan (5) UU No. 1 Tahun 1974.

Pasal 16

1. Pernikahan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
2. Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

Pasal 17

1. Sebelum berlangsungnya pernikahan pegawai pencatat nikah menanyakan terlebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah.
2. Bila ternyata pernikahan tidak disetujui oleh salah seoragng calon mempelai maka pernikahan itu tidak dapat dilangsungkan.
3. Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.

Pasal 18

Bagi calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan pernikahan sebagaimana diatur dalam bab VI.

Pasal 19

Wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahinnya.

Pasal 20

1. Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum islam yakni muslim, aqil dan baligh.
2. Wali nikah terdiri dari:
   1. Wali nikah;
   2. Wali hakim

Pasal 21

1. Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, keliompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. *Pertama,* kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. *Kedua,* kelompok kerabat saudara laki- lakikandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. *Ketiga,* kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. *Keempat,* kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.
2. Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatanya dengan calon mempelai wanita.
3. Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan akan yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah.
4. Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatanya sama yakni sama- sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak mnjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Pasal 22

Apabila wali nikah yang paling berhak, urutanya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

Pasal 23

1. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adlal atau enggan.
2. Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim harus dapat bertindak sebagai wali nikah setela ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Pasal 24

1. Saksi dalam pernikahan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah.
2. Setiap pernikahan harus disaksikan oleh dua orang saksi.

Pasal 25

Yang dapat ditunjuk sebagai saksi dalam akad nikah iala seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.

Pasal 26

Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan.

Pasal 27

Ijab dan qabul antara wali dan calon mempelai peria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.

Pasal 28

Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah mewakilkan kepada orang lain.

Pasal 29

1. Yang berhak mengucapkan qabul iala calon mempelai peria secara pribadi
2. Dalam hal-hal tertentu ucapan qabul nikah dapat di wakilkan kepada pria lain segan ketentuan calon mempelai pria member kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria
3. Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.

Pasal 30

Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 31

Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran islam.

Pasal 32

Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita sejak itu menjadi hak pribadinya.

Pasal 33

1. Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai.
2. Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahanya menjadi hutang calon pempelai pria.

Pasal 34

1. Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam pernikahan.
2. Kelailaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya pernikahan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnya pernikahan.

Pasal 35

1. Suami yang mentalak istrinya qabla al dukhul wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah.
2. Apabila suami meninggal dunia qabla al dukhul tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar mitsil.

Pasal 36

Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau dengan barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang mahar yang hilang.

Pasal 37

Apabila terjadi selisi pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaian diajukan ke pengadilan agama.

Pasal 38

1. Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi calon mempelai tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas.
2. Apabila istri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami haruns menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama pengantinya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum bayar.[[19]](#footnote-19)

# Larangan Pernikahan

Larangan pernikahan terdapat dalam Undang-Undang pernikahan Pernkahan Nomor 1 Tahun 1974 sebagai berikut:

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo.

* 1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas
  2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
  3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
  4. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
  5. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seoranng;
  6. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Pasal 9

Seorang yang masi terikat tali peerkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dlam hal yang tersebut pada Pasal 3ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini.

Pasal 10

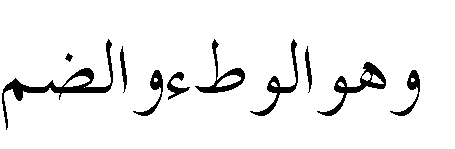
Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka dintara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinn lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 11

1. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.
2. Tenggang waktu janda jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.[[20]](#footnote-20)

# Isbat Nikah

1. **Pengertian Isbat Nikah**

Kata isbatberarti penetapan, penyungguhan, penentuan. Mengisbatkan artinya menyungguhkan, menentukan, menetapkan (kebenaran sesuatu).[[21]](#footnote-21) Sedangkan menurut fiqh nikah secara bahasa adalah  artinya “bersenggama atau bercampur”.[[22]](#footnote-22)

Para ulama ahli *fiqh* berbeda pendapat tentang makna nikah, namun secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa nikah menurut ahli *fiqh* berarti akad nikah yang ditetapkan oleh *syara’* bahwa seorang suami dapat memanfaatkan dan bersenang-senang dengan kehormatan seorang isteri serta seluruh tubuhnya.[[23]](#footnote-23) Sedang nikah menurut hukum positif yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.[[24]](#footnote-24)

Jadi pada dasarnya isbat nikah adalah penetapan atas perkawinan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam yaitu sudah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Tetapi pernikahan yang terjadi pada masa lampau ini belum atau bahkan tidak dicatatkan ke pejabat yang berwenang, dalam hal ini pejabat KUA (Kantor Urusan Agama) yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Isbat (penetapan) merupakan produk Pengadilan Agama, dalam arti bukan pengadilan yang sesungguhnya dan di istilahkan dengan *Juris diktio Voluntair.* Dikatakan bukan peradilan yang sesungguhnya karena, di dalam perkara ini hanya ada pemohon, yang memohon untuk ditetapkan tentang sesuatu yaitu penetapan nikah. Perkara voluntair adalah perkara yang sifatnya permohonan dan didalamnya tidak terdapat sengketa, sehingga tidak ada lawan. Pada dasarnya perkara permohonan tidak dapat diterima, kecuali kepentingan Undang-undang menghendaki demikian. Perkara voluntair yang diajukan ke Pengadilan Agama seperti:

* 1. Penetapan wali pengampu bagi ahli waris yang tidak mampu untuk melakukan tindakan hukum;
  2. Penetapan pengangkatan wali;
  3. Penetapan pengangkatan anak;
  4. Penetapan nikah (isbat nikah);
  5. Penetapan wali adhal.

Produk perkara voluntair ialah penetapan. Nomor perkara permohonan diberi tanda P, misalnya: Nomor 125/Pdt.P/2020/PA/Bitg. Karena penetapan itu muncul sebagai produk pengadilan atas permohonan pemohon yang tidak berlawan maka dicantum penetapan tidak akan berbunyi menghukum melainkan bersifat menyatakan *(declaratoire).* Adapun asas yang melekat pada putusan penetapan, pertama asas kebenaran yang melekat pada penetapan hanya “kebenaran sepihak”.

Kebenaran yang terkandung di dalam penetapan hanya kebenaran yang bernilai untuk diri pemohon, kebenaran tidak menjangkau orang lain. Dari asas ini lahirlah asas berikutnya, yakni kekuatan mengikat penetapan hanya berlaku pada diri pemohon, ahli warisnya dan orang yang memperoleh hak darinya,[[25]](#footnote-25) sama sekali tidak mengikat siapapun kecualihanya mengikat kepada yang telah di sebut di atas. Selanjutnya asas ketiga, yang menegaskan putusan penetapan tidak mempunyai kekuatan pembuktian kepada pihak manapun. Seterusnya yaitu asas putusan penetapan tidak memiliki kekuatan *eksekutorial*. Hal ini dapat di pahami karena amar putusan bersifat deklaratoir sehingga tidak mungkin memiliki nilai kekuatan eksekusi.

1. **Syarat-syarat Isbat Nikah**

Tentang syarat isbat nikah ini tidak dijelaskan dalam kitab fiqh klasik maupun kontemporer. Akan tetapi syarat isbat nikah ini dapat dianalogikan dengan syarat pernikahan. Hal ini karena isbat nikah (penetapan nikah) pada dasarnya adalah penetapan suatu perkawinan yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam syari’at Islam. Bahwa perkawinan ini telah dilakukan dengan sah yaitu telah sesuai dengan syarat dan rukun nikah tetapi pernikahan ini belum dicatatkan ke pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Syarat-syarat isbat nikah antara lain:[[26]](#footnote-26)

* 1. Calon mempelai pria, syarat-syaratnya :
     1. Beragama Islam
     2. Laki-laki
     3. Jelas orangnya
     4. Dapat memberikan persetujuan
     5. Tidak dapat halangan perkawinan
  2. Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya adalah:
     1. Beragama, meskipun yahudi atau nasrani
     2. Perempuan
     3. Jelas orangnya
     4. Dapat dimintai persetujuan
     5. Tidak terdapat halangan perkawinan
  3. Wali nikah syarat-syaratnya :
     1. Laki-laki
     2. Dewasa
     3. Mempunyai hak perwalian
     4. Tidak terdapat halangan perwaliannya
  4. Saksi nikah, syarat-syaratnya:
     1. Minimal dua orang laki-laki
     2. Hadir dalam ijab qabul
     3. Dapat mengerti maksud akad
     4. Islam
     5. Dewasa atau balig
  5. *Ijab> qabul>*

Rukun yang pokok dalam perkawinan yaitu ridhanya laki-laki dan perempuan serta persetujuan mereka untuk mengikat hidup berkeluarga.[[27]](#footnote-27) Karena ridha dan setuju bersifat kejiwaan yang tak dapat dilihat dengan mata kepala, karena itu harus ada pelambang yag tegas untuk menunjukkan kemauan mengadakan ikatan bersuami isteri. Pelambang itu diutarakan dengan kata-kata oleh kedua belah pihak yang mengadakan akad. Pernyataan pertama sebagai menunjukkan kemauan untuk membentuk hubungan suami isteri disebut ijab, dan pernyataan yang keduanya dinyatakan oleh pihak yang mengadakan akad berikutnya untuk menyatakan rasa ridha dan setujunya disebut qabul.[[28]](#footnote-28)

Syarat-syarat ijab qabul antara lain:

* + 1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
    2. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
    3. Memakai kata-kata *nika>h}, tazwij* atau terjemahan dari kata *nika>h}, tazwij*
    4. Antara *ijab* dan *qabul* bersambungan
    5. Antara *ijab* dan *qabul* jelas maksudnya
    6. Orang yang terkait dengan ijab qabul tidak sedang dalam ihram haji/umrah
    7. Majelis *ijab* dan *qabul* itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu: calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.

1. **Dasar Hukum Isbat Nikah**

Pada dasarnya kewenangan perkara Isbat nikah bagi Pengadilan Agama dalam sejarahnya adalah diperuntukkan bagi mereka yang melakukan perkawinan di bawah tangan sebelum diberlakukanya Undang- undang No. 1 Th.1974 tentang perkawinan, jo. Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; ( penjelasan pasal 49 ayat (2), jo Pasal 64 UU No.1Th. 1974). Namun kewenangan ini berkembang dan diperluas dengan dipakainya ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 7 ayat (2) dan (3). Dalam ayat (2) di sebutkan: “dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan Isbat nikahnya di Pengadilan Agama”; pada ayat (3) disebutkan : Isbat nikah yang diajukan kepengadilan Agama terbatas mengenai hal yang berkenaan dengan ; a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. Hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah tidaknya salah satu syarat perkawinan; dan d. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.[[29]](#footnote-29)

Dengan melihat uraian dari pasal 7 ayat 2 dan 3 KHI tersebut, berarti bahwa KHI telah memberikan kewenangan lebih dari yang diberikan oleh Undang-undang; baik oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maupun undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, padahal menurut pasal 2 TAP MPR RI No. III/MPR/2000 tentang sumber hukum dan dan tata urutan perundang- undangan; INPRES tidaklah termasuk dalam tata urutan Perundang- undangan Republik Indonesia.

Pasal 2 ayat 1 UU No 14 tahun 1970 beserta penjelasanya menentukan bahwa adanya kewenangan suatu peradilan untuk menyelesaikan perkara yang tidak mengandung unsur sengketa (voluntair) adalah dengan syarat apabila dikehendaki (adanya ketentuan/ penunjukan) oleh Undang-Undang.[[30]](#footnote-30)

Mengenai isbat nikah ini PERMENAG No. 3 tahun 1975 yang dalam pasal 39 ayat 4 menentukan bahwa jika KUA tidak bisa membuatkan dupkikat akta nikah karena catatanya telah rusak atau hilang atau karena sebab lain, maka untuk menentukan adanya nikah, talak, cerai ataupun rujuk, harus ditentukan dengan keputusan (dalam arti penetapan) Pengadilan Agama; tetapi hal ini berkaitan dengan pernikahan yang dilakukan sebelum UU No. 1 Tahun 1974 bukan terhadap perkawinan yang terjadi sesudahnya.

Dengan demikian mengenai kompetensi absolut tentang isbat nikah sebagai perkara voluntair ini tidak bisa dianalogkan (qiyaskan) dengan perkara pembatalan perkawinan, perceraian atau poligami. Prinsipnya pengadilan tidak mencari-cari perkara tetapi perkara itu telah menjadi kewenanganya karena telah diberikan oleh Undang-Undang. Penulis setuju dengan pandangan Prof. Wasit Aulawi, MA, yang berpendapat bahwa perkara isbat nikah tidak dilayani. Perkara isbat nikah adalah perkara voluntair yang harus ditunjuk oleh Undang-undang, kalau Undang-undang tidak memberikan kewenangan maka pengadilan tidak berwenang. Apabila perkawinan dibawah tangan setelah berlakunya UU No. 1 Tahun1974, di berikan tempat untuk isbat perkawinan, maka secara sosiologis pastilah akan mendorong terjadinya perkawinan bawah tangan secara Massif.[[31]](#footnote-31)

Jika dipikirkan lebih seksama, maka ketentuan pasal 7 ayat 2 KHI telah memberikan kompetensi absolut yang sangat luas tentang Isbat nikah ini tanpa batasan dan pengecualian padahal dalam penjelasan pasal- pasalnya hanya dijelaskan bahwa pasal ini hanya di berlakukan setelah berlakunya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama. Belum lagi pasal 7 ayat (3) huruf a, yang dapat mengundang problem lanjutan seperti bagaimana jika penggugat mencabut perkara cerainya, atau pemohon tidak mau melaksanakan ikrar talak karena telah rukun kembali sebagai suami isteri, padahal telah ada putusan sela tentang sahnya nikah mereka. Demikian pula pasal 7 ayat 3 huruf b; adalah sesuatu yang berlebihan, bukankah kalau hanya sekedar hilangnya kutipan akta nikah bisa dimintakan duplikat ke KUA, dan untuk sebagai tindakan preventif/kehati-hatian akan memungkinkan hilangnya buku catatan akta yang asli, maka pasal 13 ayat 1 PP No. 9 Tahun 1975 telah menentukan bahwa helai kedua dari akta perkawinan itu harus disimpan (dikirimkan oleh PPN) kepada panitera pengadilan dalam wilayah kantor pencatatan perkawinan itu berada.[[32]](#footnote-32)

Dalam ketentuan pasal 7 ayat 3 huruf c, yakni adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, hal ini justru mengarahkan kepada apa yang termasuk dalam perkara pembatalan perkawinan/nikah, bukan perkara isbat nikah, sebab biasanya orang yang melakukan nikah di bawah tangan tersebut amatlah yakin bahwa perkawinan melalui kyai/ustadz adalah telah sah dan sesuai dengan syari’at (memenuhi ketentuan pasal 2 ayat 1).

Juga terhadap ketentuan pasal 7 ayat 3 huruf e, yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974, ini adalah pasal yang amat luas jangkauanya yang tidak memberikan batasan yang jelas.[[33]](#footnote-33)

# Pencatatan Perkawinan (Legalisasi Pernikahan)

1. **Pengertian Pencatatan perkawinan**

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak dijelaskan secara rinci tentang pengertian pencatatan perkawinan. pengertian itu dijelaskan dalam penjelasan umum Undang-Undang tersebut, yaitu bahwa tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan. Namun secara bahasa pencatatan berarti proses atau perbuatan menulis sesuatu untuk peringatan dalam buku catatan.[[34]](#footnote-34) Jadi pencatatan perkawinan adalah proses atau perbuatan menulis yang dilakukan oleh petugas atau pejabat yang berwenang kedalam daftar perkawinan yang dibuktikan dengan adanya akta nikah sebagai bukti otentik.

Dengan memahami apa yang termuat dalam penjelasan umum Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 dapat dikatakan bahwa pencatatan perkawinan merupakan sebuah usaha yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Dengan maksud sewaktu-waktu dapat dipergunakan bila perlu dan dapat dipakai sebagai bukti otentik. Akta otentik ialah akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu dan dalam bentuk menurut ketentuan yang ditetapkan untuk itu, baik maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, di tempat di mana pejabat berwenang menjalankan tugasnya.[[35]](#footnote-35)

Dalam hal pencatan perkawinan, hukum Islam tidak mengatur secara jelas apakah perkawinan harus dicatat atau tidak. Dengan melihat tujuan dari pencatatan perkawinan banyak kegunaannya bagi kedua belah pihak yang melaksanakan perkawinan baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan masyarakat, misalnya dengan akta nikah itu dapat dijadikan bukti bahwa mereka telah melaksanakan perkawinan secara sah dan resmi bardasarkan hukum Islam dan hukum positif yaitu Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

1. **Tujuan Pencatatan Perkawinan**

Pada mulanya syari’at Islam baik dalam Al-qur’an atau Al-sunah tidak mengatur secara kongkrit tentang adanya pencatatan perkawinan. Ini berbeda dengan ayat muamalat (*mudayanah*) yang dalam situasi tertentu diperintahkan untuk mencatatnya. Tuntutan perkembangan, dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan.[[36]](#footnote-36)

Dan kesucian Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan upaya yang di atur melalui perundang-undangan untuk melindungi martabat perkawinan, lebih khusus lagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, yang masing-masing suami-isteri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan atau percekcokan di antara mereka, atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing. Kerena dengan akta tersebut, suami-isteri mempunyai bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.[[37]](#footnote-37)

Ketentuan pencatatan perkawinan sebenarnya bukan masalah baru bagi penduduk. Di lingkungan masyarakat yang beragama Islam, sejak tahun 1946 telah berlaku UU No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan rujuk. Namun ketentuan tersebut belum terlaksana secara efektif. Sedang bagi masyarakat pemeluk agama Kristen Protestandan Katolik, sudah sejak lama mereka mempunyai ordonansi yang mengatur pencatatan mereka.

Kemudian setelah lahirnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan masalah pencatatan perkawinan lebih ditekankan sebagai pelaksanaan Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Adapun pelanggaran ketentuan ini dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 45 PP No. 9 Tahun 1975 yang berbunyi : “Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 3, 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setingi-tingginya Rp. 7.500 (tujuh ribu lima rtus rupian).[[38]](#footnote-38)

1. **Legalisasi Pernikahan**

Pernikahan yang dilangsungkan dihadapan PPN adalah pernikahan yang sesuai dengan pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga sudah secara legal atau sah yang akan mendapatkan buku kutipan akta nikah dari KUA.

Tetapi lain halnya dengan pernikahan yang tidak mempunyai akta nikah (hilang atau memang pernikahannya tidak tercatat), maka dalam kaitannya dengan masalah perdata pernikahan semacam ini harus mendapat legalisasi atau pengakuan secara hukum dalam mendapat kanbukti otentik dari pernikahan yang telah dilangsungkan. Hal ini dilakukan berkaitan dengan masalah administrasi atau keperdataan dalam mengurus akta kelahiran anak, pendaftran sekolah dan juga status dari anak yang dilahirkan. Karena dalam pengurusan masalah administrasi setiap instansi atau lembaga terkait menanyakan dan harus menunjukkan adanya akta pernikahan.[[39]](#footnote-39)

Dalam masalah keperdataan sangat diperlukan adanya pembuktian secara yuridis yang tidak lain merupakan pembuktian historis. Dengan pembuktian ini mencoba menetapkan apa yang terjadi secara konkreto.[[40]](#footnote-40) Hal ini diatur dalam pasal 1865 BW tentang pembuktian pada umumnya yang berbunyi: “setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.[[41]](#footnote-41)

Dalam pembuktian ini yang harus dibuktikan adalah peristiwa bukan hukumnya.[[42]](#footnote-42) Dalam masalah perkara perdata harus menemukan dan menentukan peristiwa atau hubungan hukumnya dan kemudian memperlakukan atau menerapkan hukumnya terhadap peristiwa yang telah ditetapkan itu. Mengenai masalah legalisasi pernikahan ini dapat dibuktikan dengan mengajukan alat bukti seperti yang terdapat dalam pasal 164 yaitu : alat bukti surat, alat bukti saksi, alat bukti persangkaan, alat bukti pengakuan, alat bukti sumpah.[[43]](#footnote-43)

Dalam menangani masalah perdata hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nlai hukum yang berlaku dalam masyarakat (Pasal 27 (1) UU No. 14/1974 tentang pokok-pokok kekuasan kehakiman).[[44]](#footnote-44)

1. **Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan**

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui Undang-undang, untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan dan lebih khusus lagi melindungi perempuan dalam kehidupan rumah tangga.

Sedangkan dasar hukum yang yang digunakan dalam pencatatan perkawinan yaitu Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa” tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.[[45]](#footnote-45) Serta dalam KHI dijelaskan dalam pasal 5 yang berbunyi:

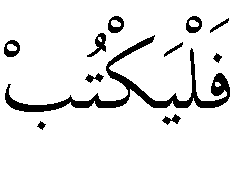
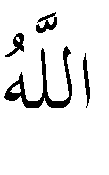
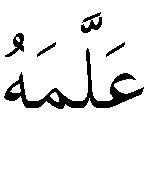
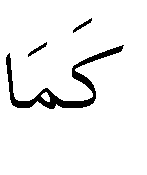
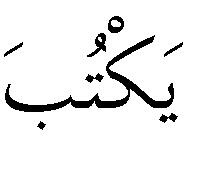
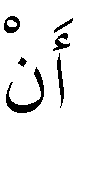
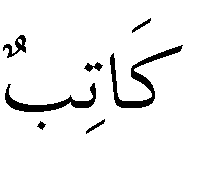
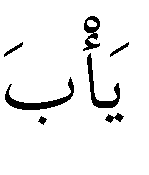
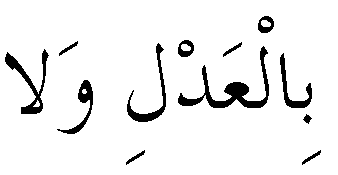
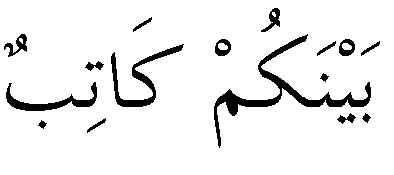
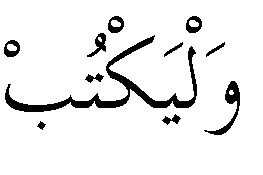
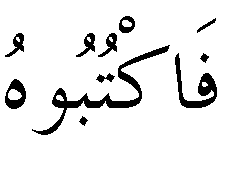
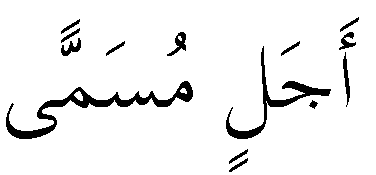
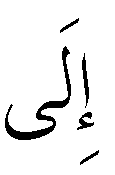
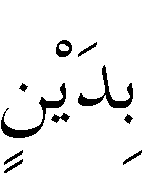
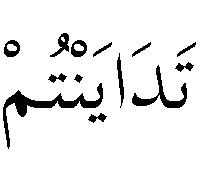
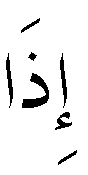
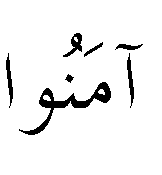
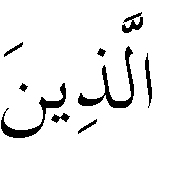
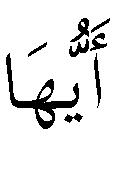
* 1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.
  2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat 1 dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1975.34

Kemudian pasal 6 KHI menjelaskan bahwa:

1. Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
2. Perkawinan yang dilangsungkan di luar pengawasan pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Perkawinan yang secara normatif harus dicatatkan adalah merupakan kesepakatan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan hukum untuk masyarakat guna terwujudnya ketertiban, kepastian dan perlindungan hukum. Dengan adanya pencatatan nikah ini akan berupaya melindungi nilai *maslahah mursalah* dalam kehidupan berumah tangga.

Di dalam al Qur’an dijelaskan tentang pentingnya penulisan atau pencatatan yaitu dalam surat Al Baqarah ayat 282:



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis.”[[46]](#footnote-46)

Inilah prinsip umum yang hendak ditetapkan. Maka menulis ini merupakan sesuatu yang diwajibkan dengan *nash*, tidak dibiarkan manusia memilihnya (untuk melakukannya atau tidak melakukannya) pada waktu melaksanakan transaksi secara bertempo (utang-piutang), karena suatu hikmah yang akan dirasakan manfaatnya. Ayat ini merupakan perintah dari Allah agar dilakukan pencatatan untuk arsip.[[47]](#footnote-47)

Ini merupakan tugas bagi orang yang menulis utang-piutang itu sebagai sekretaris, bukan pihak yang melakukan transaksi. Hikmah mengundang pihak ketiga bukan salah satu dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi ialah agar lebih berhati-hati. Juru tulis ini diperintahkan menuliskannya dengan adil, benar dan tidak boleh condong kepada salah satu pihak, tidak boleh mengurangi atau menambah suatu dalam teks yang disepakati itu.[[48]](#footnote-48)

Dengan demikian maka dapat ditegaskan bahwa, pencatatan perkawinan merupakan ketentuan yang perlu diterima dan dilaksanakan oleh semua pihak. Karena ia memiliki landasan metodologis yang cukupkokoh, yaitu *qiyas* atau maslahat mursalah yang menurut *al-Syatiby* merupakan dalil *qat’i* yang dibangun atas dasar kajian induktif (*istiqra’i*).[[49]](#footnote-49) Dengan pencatatan pernikahan maka akan membentuk dan mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib dan menjaga kemaslahatan bagi keluarga.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

1. **Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian ini adalah *field research* kualitatif dengan deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Yang mana diharapkan mampu untuk memberi gambaran yang menyeluruh tentang Peneyelesaian Perkara Isbat Nikah dalam hal ini yaitu Pernikahan Siri di Pengadilan Agama Bitung. Setelah gambaran tersebut diperoleh, kemudian dianalisa secara kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan yang terfokus untuk memecahkan masalah serta mengikuti langkah-langkah yang logis, terorganisasi dan ketat untuk mengidentifikasi masalah, mengumpulkan dan menganalisis data serta menarik suatu kesimpulan yang lengkap dan akurat.

1. **Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Agama Bitungdi Jl. Stadion 2 Saudara, Kel Manembo-nembo tengah, Kec Matuari, Kota Bitung, Sulawesi Utara. Dengan alasan agar segala bentuk perkara didalamnya lebih mudah dipahami dikarenakan adanya pengalaman mengikuti praktek di kantor tersebut.

1. **Metode Pendekatan**

Adapun Pendekatan penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis empiris. Penelitian yang menggunakan yuridis empiris berarti penelitian yang menekankan pada fakta-fakta yang nyata di lapangan.

1. **Metode Pengumpulan Data**
2. Observasi

Observasi yaitu pengamatan langsung yang dilakukan oleh peneliti mengenai lokasi penelitian di Pengadilan Agama Bitung, Kota Bitung, Sulawesi Utara yang diikuti dengan pencatatan sistematis terhadap semua gejala yang akan diteliti. Observasi tidak hanya terbatas padaorang, tetapi juga objek-objek yang lain. Dari segi prosesnya observasi dapat dibedakan menjadi observasi partisipan (peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang diamati), dan observasi non partisipan (tidak terlibat dan hanya sebagai peneliti independen), dan dari segi instrumentasi yang digunakan maka dapat dibedakan menjadi observasi terstruktur (dirancang sistematis) dan tidak terstruktur (tidak dipersiapkan secara sistematis). Adapun teknik observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi non partisipan dalam artian peneliti hanya mengamati masyarakat yang sedang menghadiri sidang Isbat Nikah di Pengadilan Agama Bitung.

1. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila penelitiingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang akan diteliti dan jika peneliti ingin mengetahui hal-hal yang lebih mendalam dari responden. Dengan demikian wawancara dilakukan dengan pertanyaan yang akan ditanyakan. Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara dengan para pejabat di lingkungan Pengadilan Agama Bitung guna memperoleh informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan judul.

1. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, baik dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya-karya yang monumental. Dokumen yang berbentuk tulisan seperti Akte, peraturan, kebijakan, dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk gambar seperti foto, video dan lain sebagainya. Teknik pengumpulan data dengan dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Adapun dokumen yang akan diteliti adalah dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan Isbat Nikah, seperti buku register perkara, akta putusan pengadilan, dan lain sebagainya.

# Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian

1. Mengetahui faktor-faktor yang menjadi alasan Permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Bitung
2. Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian Perkara Isbat nikah dalam hal pernikahan siri di Pengadilan Agama Bitung
3. Untuk mengetahui Cara Penyelesaian Perkara Isbat Nikah dalam hal pernikahan siri di Pengadilan Agama Bitung.
4. **Kegunaan Penelitian**
5. Kegunaan Ilmiah

Penelitian ini diharapkan secara teoritis mampu memberikan pencerahan serta sumbangsih pemikiran bagi masyarakat luas yang berada di setiap daerah dan terkhusus kepada daerah tempat meneliti dan sebagai masukan bagi pengembangan khasanah ilmu pengetahuan dibidang hukum, terkhusus terkait masalah pentingnya pencatatan perkawinan dan dalam hal pengetahuan tentang pernikahan siri.

1. Kegunaan Praktis

Sebagai bahan informasi baru yang bermanfaat kepada masyarakat luas terkait dengan masalah perkawinan siri, terkhusus bagi masyarkat yang belum mencatatkan perkawinannya untuk melakukan Isbat Nikah, memberikan pengetahuan bagi masyarakat sebagai langkah untuk memberikan kepastian hukum kepada suami isteri dan juga kepada anaknya ataupun yang berkaitan dengannya. Serta sebagai bahan masukan bagi praktisi dan pegawai dalamlingkup Pengadilan Agama maupun di luar lingkup Pengadilan Agama.

BAB IV

PERTIMBANGAN HAKIM DI PENGADILAN AGAMA BITUNG DALAM PERKARA PENETAPAN ISBAT NIKAH NOMOR 66/Pdt.P/2019/PA.Btg

# Pengadilan Agama Bitung

* 1. **Deskripsi Pengadilan Agama Bitung**

Pengadilan Agama adalah salah satu instansi pemerintah di bawah naungan Mahkamah Agung yang menangani masalah-masalah hukum perdata dan merupakan Pengadilan Agama di tingkat pertama (Kabupaten Kota) sesuai dengan keberadannya itu maka lembaga peradilan ini melayani kebutuhan masyarakat dalam bidang hukum perdata terutama hukum keluarga khusus bagi umat Islam.

Pengadilan berarti tempat di mana dilakukan peradilan, yakni majelis hakim atau mahkamah. Oleh karena itu, Pengadilan Agama sering disebut pula mahkamah syar’iyah, artinya pengadilan atau mahkamah yang menyelesaikan perselisihan hukum agama atau hukum syara’.[[50]](#footnote-50)

Secara Yuridis Formal, Peradilan Agama sebagai suatu Badan Peradilan yang terkait dalam sistem kenegaraan untuk pertama kali lahir di Indonesia (Jawa dan Madura) pada tanggal 1 Agustus 1882, berdasarkan Keputusan Raja Belanda (Konninklijk Besluit) yakni Raja Willem III tanggal 19 Januari 1882 Nomor 24 yang dimuat dalam Staatblad 1882 Nomor 152. Badan Peradilan ini bernama Priesterraden yang kemudian lazim disebut Rapat Agama atau Raad Agama dan terakhir dengan Pengadilan Agama.

* 1. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Bitung

Berdasarkan pasal 4 ayat 1 undang-undang Nomor 3 tahun 2004 bahwa Pengadilan Agama Bitung berkedudukan di ibukota Kabupaten / Kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten /kota, maka wilayah Pengadilan Agama Bitung yang terdiri dari 8 wilayah Kecamatan dan 69 Kelurahan, dari luas wilayah 304 km2 pembagian wilayah ini merupakan perubahan dari 5 Kecamatan menjadi 8 Kecamatan berdasarkan Peraturan Walikota Bitung Nomor 3 tahun 2007 tantang peresmian perubahan, pemekaran serta pembentukan kecamatan dan kelurahan dikota Bitung yakni :

* + 1. Kecamatan Ranowulu : 11 Kelurahan
    2. Kecamatan Matuari : 8 kelurahan
    3. Kecamatan Girian : 7 Keluraham
    4. Kecamatan Madidir : 8 Kelurahan
    5. Kecamatan Maesa : 8 Kelurahan
    6. Kecamatan Aertembaga : 10 Kelurahan
    7. Kecamatan Lembe Utara : 10 Kelurahan
    8. Kecamatan Lembe Selatan : 7 Kelurahan

Batas wilayah Kota Bitung adalah sebagai berikut :

Utara berbatasan dengan kabupaten Minahasa Utara, Selatan berbatasan dengan Laut Maluku, Barat berbatasan dengan Kabupaten Minahasa Utara, dan sebelah timur berbatasan dengan Laut Maluku.

1. Kewenangan Absolut

Dalam UUD 1945 Pasal 24 ayat (2) menyatakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan Peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 2 menyatakan:

“Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini.”

Kekuasaan kehakiman di lingkungan Pengadilan Agama berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi. Pasal 3 UU Peradilan Agama tersebut menyatakan Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.

Pengadilan Agama merupakan lembaga peradilan tingkat pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi Syari’ah sebagaimana di atur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009.

Adapun sebagai pengadilan agama tingkat satu, Pengadilan Agama Bitung mempunyai kewenangan absolut yang sama, yang pada pokoknya ada sembilan perkara, yaitu: perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari’ah.

Dalam mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangannya, pengadilan agama harus menganut asas personalitas keislaman,[[51]](#footnote-51) seperti bunyi pasal 2 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, “Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”. Artinya bahwa pihak-pihak yang berperkara harus sama-sama beragama Islam atau pada saat terjadi hubungan hukum, kedua belah pihak sama-sama beragama Islam

1. Kewenangan Relatif

Kewenangan relatif atau dalam bahasa Belanda disebut *distributie van rechtsmacht* merupakan kekuasaan antar pengadilan agama berdasarkan wilayah hukumnya.[[52]](#footnote-52) Atau dengan kata lain, kewenangan relatif adalah wilayah kekuasaan suatu pengadilan agama di mana apabila terjadi sengketa antar para pihak yang tempat tinggalnya masuk dalam cakupan wilayah tersebut pengadilan yang membawahinya berhak untuk mengadili

* 1. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bitung

Dalam UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 7 Tahun 1989 Pasal 9 Ayat (1) dikatakan bahwa susunan peradilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim, Anggota, Panitera, Sekretaris dan Jurusita.[[53]](#footnote-53) Selanjutnya dalam Pasal 26 dan Pasal 43 juga dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugasnya sebagai Panitera, Sekretaris dibantu oleh Wakil Sekretaris Panitera (Wapan) yang membantu Panitera atau Sekretaris dalam bidang administrasi perkara.

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bitung disusun sesuai dengan surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1996 tahun 2012. Dengan fungsi dan peran masing-masing sebagaimana Pengadilan Agama yang ada di Indonesia. Struktur tersebut sangat penting guna mempertegas kedudukan dan kewenangan tanggung jawab masing-masing bagian. Adapun struktur organisasi : Pengadilan Agama Bitung adalah sebagai berikut:

1. **Ketua** : Amran Abbas, S.Ag., SH, MH..
2. **Wakil** : Masita Olii, S.HI
3. **Hakim-hakim** : Asmawati Sarib, S.Ag., Hizbuddin Maddatuang, SH., MH., Nurafni Anom, SHI.
4. **Panitera** : Drs.Subardi Mooduto
5. **Sekretaris** : Irma Tadju, SHI.,
6. **Panmud Hukum** : Hanafie Pulukadang, S.Ag.

**Panmud Gugatan** : Surianto Mahmud, BA

**Pandmud Permohonan** : Kosong

1. **Kasubag Perencanaan TI dan Pelaporan** : Nurdiana Ode, SHI.

**Kasubag Kepegawaian dan Ortala** : Fitriani Lundeto, SHI.

**Kasubag Umum dan Keuangan** : Shintia Mandulangi, SE.

1. **Panitera pengganti** : Jane,SH,
2. **Jurusita pengganti** : Chairul Amri, ST., Fadly Ratuwalangon.[[54]](#footnote-54)
3. **Deskripsi Penetapan isbat nikah di Pengadilan Agama Bitung Nomor 66/Pdt.P/2019/PA.Bitg**

Isbat Nikah ya diajukan oleh XX, umur 34 tahun, Warga Negara Indonesia, agama Islam, tempat kediaman di Lingkungan II, RT 008, RW 002, Kelurahan Kakenturan Dua, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, tertanggal 7 Oktober 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung dengan register Nomor: 66/Pdt.P/2019/PA.Bit

Dalam surat permohonannya, para Pemohon mengemukakan bahwa pada tanggal 23 Agustus 2019 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam, yang dilaksnakan di Kelurahan Bitung Timur, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, dengan wali nasab bernama SB (Paman kandung Pemohon II) dan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi nikah yang masing-masing bernama FB dan AM dengan mas kawin berupa sejumlah uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai.

Pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda (cerai mati), antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum Islam, maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.

Setelah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai keturunan. sejak pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang ini tidak pernah bercerai dan pernikahannya tidak pernah dipermasalahkan oleh orang-orang yang berada dilingkungan tempat tinggal Para Pemohon.

Yang menjadi alasan pengajuan permohonan isbat nikah ini adalah untuk untuk keperluan mengurus segala sesuatu yang timbul akibat dari perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II. Dan juga Para Pemohon adalah orang kurang mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan Kakenturan Dua dengan Nomor 360/SKTM/1007/X/2019 tanggal 01 Oktober 2019.[[55]](#footnote-55)

1. **Penyelesaian Perkara Penetapan Pengadilan Agama Bitung Tentang Isbat Nikah No.66/Pdt.P/2019/PA.Bitg**

Dalam penyelesaian perkara ini, berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana telah diuraikan di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bitung. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan memanggil, memeriksa, dan mengadili serta menjatuhkan putusan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Faisal Tangkudung bin Johan Tangkudung**) dengan Pemohon II (**Susanti Balango binti Muhammad**
3. Membebaskan biaya perkara;

Pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri dalam persidangan, mereka menyatakan tetap melanjutkan permohonannya, karena itu pemeriksaan dilanjutkan dengan dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Untuk memperkuat dalil-dalil permohonan para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa saksi-saksi :

1. Saksi 1, tempat Tanggal Lahir, Bitung, 18 Juni 1982, umur 37 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak bekerja, Alamat Lingkungan II, RT 08 RW 02, Kelurahan Kakenturan Dua, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
2. Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri karena Saksi bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II;
3. Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 23 Agustus 2019 di Kelurahan Bitung Timur, Kecamatan Maesa Kota Bitung;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan syariat Islam dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II, atas dasar suka sama suka dan melalui proses ijab kabul dengan wali nikah adalah Paman kandung Pemohon II bernama Saleh Balango, serta dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Faisal Balango dan Abdila Masoara, dengan maharnya berupa sejumlah uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
5. Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga (nasab) dan tidak ada halangan perkawinan, karena hubungan semenda atau sesusuan, dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan tersebut serta tidak pernah terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan batalnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan belum dikaruniai keturunan;
8. Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak manapun yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah karena Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai Buku Nikah;
10. Saksi 2, Tempat Tanggal Lahir, Bitung, 14 Januari 1990, umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Sopir, Alamat Lingkungan II, RT 09 RW 02, Kelurahan Kakenturan Dua, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, saksi mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
11. Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri karena Saksi bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II;
12. Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 23 Agustus 2019 di Kelurahan Bitung Timur, Kecamatan Maesa Kota Bitung;
13. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan syariat Islam dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II, atas dasar suka sama suka dan melalui proses ijab kabul dengan wali nikah adalah Paman kandung Pemohon II bernama Saleh Balango, serta dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Faisal Balango dan Abdila Masoara, dengan maharnya berupa sejumlah uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
14. Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
15. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga (nasab) dan tidak ada halangan perkawinan, karena hubungan semenda atau sesusuan, dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan tersebut serta tidak pernah terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan batalnya pernikahan tersebut;
16. Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan belum dikaruniai keturunan;
17. Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak manapun yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
18. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah karena Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai Buku Nikah;

Para Pemohon telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi dan mohon untuk diisbatkan.

Majelis Hakim memandang telah terungkap fakta yang pokoknya menguatkan dalil para pemohon, dan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XX) dengan Pemohon II (YY) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2019 di Kelurahan Bitung Timur, Kecamatan Maesa, Kota Bitung;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara;
4. **Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Bitung dalam Menetapkan Isbat Nikah perkara No.66/Pdt.P/2019/PA.Bitg.**

Dalam menyelesaikan perkara ini, ada beberapa pertimbangan hukum yang digunakan majelis hakim pengadilan agama Bitung dalam memutus perkara Nomor 66/Pdt.P/2019/PA.Bitg

* 1. Berdasrkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, beserta penjelasannya, yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 102 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama ;
  2. Bahwa Pengadilan Agama Bitung telah mengumumkan adanya permohonan Pengesahan Nikah ini pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bitung selama 14 hari, dan selama itu tidak ada orang/pihak ketiga yang keberatan atau mengganggu gugat terhadap status perkawinan para Pemohon, dengan demikian ketentuan sebagaimana diperintahkan dalam halaman 145 angka 11 buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama telah dilaksanakan ;
  3. Menimbang, dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut :
     1. Bahwa setelah mereka menikah pada tanggal 23 Agustus 2019 di Kelurahan Bitung Timur, Kecamatan Maesa, Kota Bitung tidak pernah mendapatkan Akta/buku nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) sampai sekarang, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah ini untuk kepastian hukum dan untuk kepentingan hukum lainnya;
     2. Bertindak sebagai wali nikah adalah Paman Pemohon II disaksikan oleh 2 orang saksi, dengan maharnya berupa sejumlah uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai ;
     3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah tersebut dalam rangka pengurusan Buku Nikah/Akta Nikah untuk mendapatkan kepastian hukum dan untuk kepentingan hukum lainnya;
     4. Mengajukan alat bukti saksi berupa 2 (dua) orang saksi;
  4. Bahwa 2 orang saksi para Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda menurut garis lurus dengan para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 179 Rbg.
  5. Bahwa berdasarkan pembuktian dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 23 Agustus 2019 di Kelurahan Bitung Timur, Kecamatan Maesa Kota Bitung, ternyata perkawinan tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan menurut syariat Islam, maupun menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga perkawinan Pemohon I (XX) dan Pemohon II (YY) dapat dinyatakan sah menurut hukum;
  6. Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, telah memenuhi syarat dan rukun suatu pernikahan, dengan demikian Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan menetapkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah sah menurut hukum, hal ini sesuai dengan dalil syar’I berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

عدل شاهدى و بولى الا نكاح لا

Artinya: “Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil”;

* 1. Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti terjadinya perkawinan tersebut, maka Majelis hakim berpendapat bahwa dengan sahnya perkawinan Pemohon I (XX) dan Pemohon II (YY) sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka penetapan ini dapat dipergunakan sebagai bukti adanya perkawinan yang sah dan kepada mereka diberi hak untuk mengurus Buku Nikah/Akta Nikah dan untuk kepentingan hukum lainnya.
  2. Berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam sebagaimana dalam Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan pengesahan nikah oleh para Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I (Faisal Tangkudung bin Johan Tangkudung) dan Pemohon II (Susanti Balango binti Muhammad Balango) adalah sah menurut hukum

Peneliti melanjutkan pertanyaan kepada narasumber terkait dengan pertimbangan-pertimbangan dan dasar hukum yang diberikan oleh seorang hakim dalam mengabulkan permohonan isbat nikah yang pernikahannya dilakukan setelah tahun 1974.

Adapun hasil wawancara dengan Hakim Pemeriksa untuk pertimbangan dan dasar hukum sebagai berikut:

Asmawati Sarib, S.Ag berpendapat bahwa “Nikah sirri sebetulnya dalam undang-undang yang dibolehkannya isbat nikah itu adalah nikah sirri yang terjadi sebelum terbitnya UU Perkawinan tahun 1974, karena pada waktu itu belum adanya aturan tentang pencatatan perkawinan, secara undang-undang itu yang dibolehkan melakukan isbat nikah. Dasar hukumnya yang digunakan oleh Majelis Hakim atau Hakim menerima dalam mengabulkan isbat nikah bagi nikah sirri tersebut yaitu menggunakan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 ayat 1 dan 2. Selama nikah sirrinya itu memenuhi syarat dan rukun suatu perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai 11 Undang- Undaang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 14 sampai 38 Kompilasi Hukum Islam dan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan atau halangan kawin. Sebenarnya KHI di Indonesia itu bukan hukum positif atau hukum tertulis, namun ketika pasal-pasalnya diambil dan dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim maka di (KHI) menjadi hukum dan itu sudah dijadikan hukum terapan di Pengadilan Aagama Bitung.[[56]](#footnote-56)

Menurut pandangan Hakim Pengadilan agama Bitung, semua alasan permohonan isbat nikah yang diajukan harus sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) dan (2) meskipun isbat nikah tersebut diajukan untuk perkawinan yang dilakukan setelah tahun 1974 selama pernikahannya memenuhi rukun dan syarat serta larangan dalam perkawinan.

Dalam sidang isbat nikah perlu adanya bukti-bukti. Bukti tersebut bisa bukti surat dan bukti saksi. Pengadilan Agama dengan isbat nikah mempunyai andil yang besar dan penting dalam upaya memberikan rasa keadilan dan kepastian serta perlindungan hukum bagi masyarakat. Mereka yang selama ini tidak memiliki Kartu Keluarga karena tidak mempunyai Akta Nikah, setelah adanya penetapan isbat nikah oleh Pengadilan Agama perkawinan mereka mempunyai kekuatan atau perlindungan hukum, dan mereka akan mudah mengurus Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran anak-anak mereka sehingga sudah tidak kesulitan untuk masuk sekolah. Bahkan, calon jamaah haji yang tidak mempunyai Akta Nikah sangat terbantu dengan isbat nikah oleh Pengadilan Agama untuk mengurus paspor.

1. **Analisis Yuridis terhadap Penetapan Isbat Nikah Pengadilan Agama Bitung Nomor Perkara 66/Pdt.P/2019/PA.Bitg**
2. Dasar Pertimbangan Hakim PA Bitung Dalam Menetapkan Permohonan Isbat Nikah

Perkara isbat nikah yang diatur dalam KHI merupakan perkara yang sifatnya volunteer (tidak ada lawan). Isbat nikah yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan ke Pengadilan agama adalah penetapan tentang pernikahan yang telah dilakukan oleh seorang pria dan wanita sebagai suami istri. Pernikahan yang terjadi sudah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam hukum Islam sah secara agama yaitu telah terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan.[[57]](#footnote-57)

Drs. H. Arifin, M.H berpendapat bahwa “Nikah sirri sebetulnya dalam undang-undang yang dibolehkannya isbat nikah itu adalah nikah sirri yang terjadi sebelum terbitnya UU Perkawinan tahun 1974, karena pada waktu itu belum adanya aturan tentang pencatatan perkawinan, secara undang-undang itu yang dibolehkan melakukan isbat nikah

Dasar hukumnya yang digunakan oleh Majelis Hakim atau Hakim menerima dalam mengabulkan isbat nikah bagi nikah sirri tersebut yaitu menggunakan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 ayat 1 dan 2. Selama nikah sirrinya itu memenuhi syarat dan rukun suatu perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 sampai 38 Kompilasi Hukum Islam dan diantara keduanya tidak ada halangan sebagai mana diatur dalam Pasal 8 sampai 11 Undang-Undaang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. dan sebenarnya KHI di Indonesia itu bukan hukum positif atau hukum tertulis, namun ketika pasal-pasalnya diambil dan dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim maka di (KHI) menjadi hukum dan itu sudah dijadikan hukum terapan di Pengadilan Agama Bitung.[[58]](#footnote-58)

Menurut pandangan Hakim Pengadilan agama Gresik, semua alasan permohonan isbat nikah yang diajukan harus sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) dan (2) meskipun isbat nikah tersebut diajukan untuk perkawinan yang dilakukan setelah tahun 1974 selama pernikahannya memenuhi rukun dan syarat serta larangan dalam perkawinan.

Berdasarkan dasar dan pertimbangan Hakim mengabulkan permohonan isbat nikah berpedoman pada suatu kaedah hukum fiqh dan pertimbangan-pertimbangan lain, khususnya tentang dikabulkannya pengajuan isbat nikah dalam penetapan Nomor 66/Pdt.P/2019/PA.Bitg, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum oleh Majelis Hakim sudah sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan no. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 4 kompilasi hukum islam, dan telah memenuhi syarat dan rukun dengan pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para pemohon tersebut patut di kabulkan guna mengurus akta nikah dan selanjutnya akan dipergunakan untuk kelengkapan adminitrasi kepegawaian atas nama Pemohon I, implikasi dari kesimpulan diatas ialah ketika permohonan ini ditetapkan maka seseorang yang ingin mengajukan isbat nikah yang nikah sirrinya dilakukan pasca berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 semakin mudah dalam hal melegalkan status perkawinan mereka.

1. Analisis Yuridis terhadap Penetapan Isbat Nikah Bagi Pelaku Nikah Sirri Pasca Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974

Suatu perbuatan kawin atau nikah, baru dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum (menurut hukum) apabila dilakukan menurut ketentuan yang berlakau secara positif. Ketentuan hukum yang mengatur mengenai tata cara perkawinan yang dibenarkan oleh hukum adalah seperti yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 1975. Perkawinan dengan tata cara demikianlah yang mempunyai akibat hukum, yaitu akibat yang mempunyai hak mendapat pengakuaan dan perlindungan hukum[[59]](#footnote-59)

Dalam perkara Permohonan isbat nikah ini Majelis Hakim memiliki berbagai pertimbangan, sebagai berikut:

* 1. Telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Agustus 2019 di Kelurahan Bitung Timur, Kecamatan Maesa, Kota Bitung menurut syariat Islam.
  2. Dengan wali nasab bernama Saleh Balango (Paman kandung Pemohon II) dan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi nikah yang masing-masing bernama Faisal Balango dan Abdila Masoara dengan mas kawin berupa sejumlah uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai.
  3. Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.
  4. Menimbang, bahwa 2 orang saksi para Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda menurut garis lurus dengan para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasa 172 Rbg.
  5. Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi, yang menerangkan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara Islam, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan 2 orang saksi tersebut telah memenuhi syarat meteriil sebagaima diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti
  6. Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi dasar untuk menentukan keabsahan suatu perkawinan, adalah ketentuan agama yang dianut para Pemohon, yaitu agama Islam
  7. Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus dipenuhi rukun nikah yaitu calon suami, calon Istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul, serta syarat perkawinan, antara lain adanya mahar
  8. dalil syar’I berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

عدل شاهدى و بولى الا نكاح لا

Artinya: “Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil”;

* 1. Menimbang bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti terjadinya perkawinan tersebut, maka Majelis hakim berpendapat bahwa dengan sahnya perkawinan Pemohon I (XX) dan Pemohon II (YY) sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka penetapan ini dapat dipergunakan sebagai bukti adanya perkawinan yang sah dan kepada mereka diberi hak untuk mengurus Buku Nikah/Akta Nikah dan untuk kepentingan hukum lainnya.
  2. Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam sebagaimana dalam Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan pengesahan nikah oleh para Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I (Faisal Tangkudung bin Johan Tangkudung) dan Pemohon II (Susanti Balango binti Muhammad Balango) adalah sah menurut hukum.

Dalam amar putusan penetapan Nomor 66/Pdt.P/2019/PA.Bitg. majelis Hakim dalam pertimbangannya, perkawinan para pemohon tersebut Hakim tidak melihat adanya unsur-unsur yang menjadi halangan untuk melakukan pernikahan serta tidak ada kepalsuan tentang bukti-bukti atas perkawinan tersebut dan telah sesuai syariat Islam dan secara subtansial memenuhi syarat dan rukun sebagaimana diatur Pasal 14 sampai dengan 38 Kompilasi Hukum Islam dan keduanya tidak ada halangan sebagai mana diatur dalam Pasal 8 sampai 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawina jo., dan berlandasan pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, pengesahan nikah dimaksud telah berdasarkan hukum dan beralasan dalam melakukan penetapan isbat nikah tersebut

Menurut pandangan penulis pertimbangan hukum oleh hakim dalam penetapan Nomor 0024/Pdt.P/2015/PA.Gs di atas memang sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meski demikian, penulis berpendapat bahwa hakim kurang tegas dalam memberikan pertimbangan hukum, dalam pertimbangannya, majelis hakim tidak mencantumkan pasal 7 ayat 3 yang berbunyi: Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

* + 1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
    2. Hilangnya Akta Nikah
    3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
    4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan
    5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun1974

Pasal di atas justru menjadi pasal yang amat penting sebagai acuan hakim dalam mengabulkan permohonan istbat nikah, didalamnya tercantum mengenai hal-hal diperbolehkannya melakukan istbat nikah bagi para pelaku nikah sirri, boleh tidaknya seseorang melakukan istbat nikah tercantum dalam butir a-e dalam pasal tersebut, dan pasal ini justru tak dicantumkan dalam pertimbangan majelis hakim.

Sebenarnya tidak ada paksaan bagi masyarakat untuk mencatatkan perkawinan dalam artian, jika kita tidak mencatatkan perkawinan bukan berarti kita melakukan kejahatan. Namun jelas pula dalam hal ini memberikan dampak atau konsekuensi hukum tertentu yang khususnya merugikan perempuan dan anak-anak lalu membuka ruang pernikahan-pernikahan dibawah tangan yang lain.

Apalagi kasus isbat nikah ini menegaskan bahwa posisi Pemohon II adalah seorang janda cerai mati, yang mengharuskan adanya penggalian fakta oleh hakim tentang perceraian yang telah terjadi pada Pemohon II. Peneliti tidak menemukan penggalian fakta-fakta secara detil oleh hakim, tentang:

1. Adanya alat bukti akta kematian dari suami Pemohon II sebelumnya
2. Adanya keterangan-keterangan saksi yang menegaskan bahwa suami Pemohon II sebelumnya telah meninggal dunia
3. Pernikahan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan sebelum meninggal suami Pemohon II sebelumnya

dan ini menurut peneliti yang masih harus dilengkapi dalam putusan hakim terkait penetapan isbat nikan perkara nomor 66/Pdt.P/2019/PA. Bitg., yang mana penetapan ini menjadi kekuatan hukum para pihak untuk melegalkan pernikahannya secara administrasi Negara.

Terlepas dari kurang tegasnya hakim dalam memberikan pertimbangan hukum, dapat disimpulkan bahwa tinjauan yuridis terhadap pertimbangan hakim menetapkan isbat nikah, menurut beberapa pertimbangan-pertimbangan hakim atas dibolehkannya permohonan isbat nikah diantaranya berdasarkan pada pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 4, ketentuan Pasal 8 sampai 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 14 sampai dengan 38 Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan isbat nikah ini boleh diajukan berdasarkan guna mengurus akta nikah dan dan untuk kepentingan hukum lainnya.

BAB V

PENUTUP

# Kesimpulan

Dari uraian mengenai pembahasan tentang permohonan isbat nikah yang terjadi pasca berlakunya UU No. 1 Tahun 1974, maka penulis berusaha untuk memberikan kesimpulan sebagai berikut:

* 1. Pertimbangan dan dasar hukum Hakim mengabulkan permohonan isbat nikah tersebut berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 4, Pasal 7 ayat (1) dan (2), dan selama nikah sirrinya itu memenuhi syrat rukun suatu perkawinan sebagai mana di atur Pasal 14 sampai dengan 38 KHI serta keduanya tidak ada halangan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai 11 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Implikasi yang terjadi akibat dari pengabulan isbat nikah tersebut adalah akan semakin banyak masyarakat yang akan meremehkan pencatatan nikah karena dianggap mudah untuk melakukan isbat nikah dikemudian hari.
  2. Secara tinjauaan Analisis yuridis yang telah diuraikan diatas, dalam penetapan nomor 66/Pdt.P/2019/PA.Bitg, bahwa tinjauan Analisis Yuridis terhadap Penetapan Isbat. menurut beberapa pertimbangan-pertimbangan hakim atas dibolehkannya permohonan isbat nikah diantaranya adalah dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Jo Pasal 4 Kompilasi hukum Islam tentang perkawinan. Dasar hukumnya yang digunakan oleh Majelis Hakim atau Hakim menerima dalam mengabulkan isbat nikah bagi nikah sirri tersebut yaitu menggunakan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 ayat 1 dan 2, selama nikah sirrinya itu memenuhi syarat dan rukun suatu perkawinan. Majelis hakim dalam mengabulkan perkara tersebut adalah sudah benar berdasarkan pertimbangan khusus seperti penggunaan KHI, serta pertimbangan lainnya, meski dalam pertimbangan hukumnya hakim kurang tegas dan rinci dalam penggalian fakta, serta tidak mencantumkan pasal 7 ayat 3 sebagai salah satu acuan hukum dalam mengabulkan permohonan istbat nikah.

1. Saran

Sekedar saran yang terkait dengan penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum acara. Oleh karena itu, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

* 1. Bagi para Hakim Pengadilan Agama Bitung yang menangani perkara permohonan isbat nikah terutama hanya dijumpai persoalan pernikahan sirri yang dilakukan masyarakat selama ini cenderung membawa banyak kerepotan dan mudharat. Untuk itu harus diperlukan adanya penyuluhan dan sosialisasi mengenai dampak yang di timbulkan dari perkawinan di bawah tangan atau perkawinan sirri, penyuluhan mengenai pentingnya pencatatan perkawinan untuk kehidupan yang akan datang terhadap anak-anak maupun harta yang diperoleh dalam suatu perkawinan di bawah tangan tersebut
  2. Pengadilan Agama seharusnya lebih berhati-hati atau lebih tegas lagi dalam menerapkan Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) apabila ingin menerima atau memutus perkara tentang permohonan isbat nikah. Jangan sampai dimanfaatkan oleh mereka yang melakukan nikah sirri atau nikah di bawah tangan setelah berlakunya UU No. 1 Tahun 1974. Karena masyarakat banyak yang belum mengetahui prosedur beracara di Pengadilan Agama.

**DAFTAR PUSTAKA**

Ar Rifa’i, Muh. Nasib.*Taisiru al Alliyul qadir li Ikhtishari Tafsir Ibnu Katsir*, Riyadh: Maktabah Ma;arrif, 1989. Terjemahan, Syihabuddin, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.

Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta. 1998.

Arto, A. Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. VIII, 2008.

Aulawi, A. *wasit Pernikahan Harus Melibatkan Orang Banyak, dalam Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*, No. 28 Thn. VII Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 1996.

Bashir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*,Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, cet ke-8,1996.

Darmabrata, Wahyono. *Tinjauaan UU No. 1 Tahun 1974*, Jakarta: Gitama Jaya, 2003.

Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Bandung; Syamil Cipta Media, 2005.

Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1999/ 2000.

Harhap, M. Yahya. *Kedudukan, Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta; Sinar Grafika, 2003.

Jaih, Mubarok. *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung, Pustaka Bani Quraisy, tt.

Jatmika, Rahmad. *“Isbat Nikah Massal Tahun 2011 Di Pengadilan Agama Wonosari Studi Terhadap Alasan Dan Dasar Hukum Hakim Atas Penetapan Isbat Nikah*”, Skripsi—UIN Sunan Kalijaga Jakarta, 2012.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.,

Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Nuansa Aulia, 2008.

MD,Mahfud. *Kompetensi dan Struktur Organisasi Peradilan Agama, dalam: Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*,Yogyakarta: UII Press, 1993.

Mertokusumo,Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1996.

Muhtadim Ust. Labib Mz. *Kumpulan Hadits Pilihan Shahih Bukhari*, Surabaya: Tiga Dua 1993.

Nur, Djamaan. *Fiqh Munakahat*, Semarang: CV. Toha Putra, 1993

Penetapan berkas No.66/Pdt.P/2019/PA.Bitg.

Quthb, Sayyid.Fi Zhilalil Qur’an, Terjemahan As’ad Yasin, et al., *“Tafsir fi zhilalil Qur’an Di Bawah Naungan Al Qur’an* ”, Jilid I, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.

R. Tjitrosudibio, R. Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 475.

Ramulyo, Moh.Idris. *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996

Rasyid, Raihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: CV. Rajawali, 1991.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*, cet keempat, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.

Sabiq, Sayid. Alih bahasa oleh Moh. Thalib, *Fikih Sunnah*, Bandung: PT. Al Ma’arif, 1997.

Salim, Nasruddin. *”Isbat Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam Tinjauan Yuridis, Filosofis dan Sosiologis, dalam Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*, No.62, Th. XIV Jakarta: Yayasan Al Hikmah, 2003.

*Aktualisasi Hukum Islam*, No.62 THN. XIV, Jakarta : Al Hikmah dan DITBINBAPERA Islam,2004.

Soemiyati, Hukum *Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1986.

Subhan, Muhammad. *“Panduan Penelitian*”, dalam www.conflictandde velopment.Org/pdf, diakses pada 13 April 2015.

Waluyo, Bandung, *Penetapan Hukum dalam Praktek*. Jakarta:Sinar Grafika. 1996.

Zahid, Moh. *Dua Puluh Lima tahun Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Departemen Agama R.I. Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, 2002.

1. Republik Indonesia, Undang-undang No. 1 Tahun 1974, pasal 1 dan 2 [↑](#footnote-ref-1)
2. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada pengadilan Agama* (Cet. IX; Yokyakarta:Pustaka Pelajar, 2011), h. 41 [↑](#footnote-ref-2)
3. Artidjo Alkostar, *Karakteristik Putusan PengadilanYurisprudensi* (Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia, 2013), h. 55 [↑](#footnote-ref-3)
4. Ahmad Warsono Munawir, Al–Munawir Kamus Arab-Indonesia, h. 145 [↑](#footnote-ref-4)
5. Al-Qur’an, 4:1 [↑](#footnote-ref-5)
6. Al-Qur’an, 51:49 [↑](#footnote-ref-6)
7. Kompilasi Hukum Islam, Pasal 5 dan 6 [↑](#footnote-ref-7)
8. Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia, Teori, Praktik Membuat dan Permasalahannya*, (Bandung: Citra Aditiya Bakti, 2009), h. 164 [↑](#footnote-ref-8)
9. Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*, (Jakarta: Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2010), h.147 [↑](#footnote-ref-9)
10. Kamus Arab Indonesia, Arab dan terjemahannya [↑](#footnote-ref-10)
11. Tim Permata Press, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,* (Cet. I; Jakarta: Permata Press, 2008), h. 7 [↑](#footnote-ref-11)
12. Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam,* pasal 7 ayat (2), 2008, h. 3 [↑](#footnote-ref-12)
13. Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Admistrasi Peradilan Agama Buku II*, 2013 [↑](#footnote-ref-13)
14. Moh.Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam,* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hal. 2 [↑](#footnote-ref-14)
15. Ibid., hal. 133 [↑](#footnote-ref-15)
16. Mubarok Jaih, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia,* (Bandung, Pustaka Bani Quraisy, tt), hal. 32. [↑](#footnote-ref-16)
17. Ibid., hal. 33 [↑](#footnote-ref-17)
18. Wahyono Darmabrata, *Tinjauaan UU No. 1 Tahun 1974,* (Jakarta: Gitama Jaya, 2003), hal. 101 [↑](#footnote-ref-18)
19. Kompilasi Hukum Islam, ( Bandung: Nuansa Aulia, 2008), hal. 5-11 [↑](#footnote-ref-19)
20. Ibid., hal. 83-84 [↑](#footnote-ref-20)
21. Tim Penyusun Kamus*, Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. Ke-3 (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 339. [↑](#footnote-ref-21)
22. Djamaan Nur*, Fiqh Munakahat*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1993), 1. [↑](#footnote-ref-22)
23. Ibid., hal. 2 [↑](#footnote-ref-23)
24. Kompilasi Hukum Islam, ( Bandung: Nuansa Aulia, 2008), hal. 80. [↑](#footnote-ref-24)
25. Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1991), hal. 73. [↑](#footnote-ref-25)
26. Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia,* cet keempat, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 71.

    [↑](#footnote-ref-26)
27. Sayid Sabiq alih bahasa oleh Moh. Thalib*, Fikih Sunnah*, (Bandung: PT. Al Ma’arif, 1997), 48 [↑](#footnote-ref-27)
28. Ibid., hal. 49 [↑](#footnote-ref-28)
29. Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum,* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1999/ 2000), 137. [↑](#footnote-ref-29)
30. Nasruddin Salim,”*Isbat Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam (Tinjauan Yuridis, Filosofis dan Sosiologis),* dalam *Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam,* No.62, Th. XIV (Jakarta: Yayasan Al Hikmah, 2003), hal. 70 [↑](#footnote-ref-30)
31. A. wasit Aulawi, *Pernikahan Harus Melibatkan Orang Banyak,* dalam *Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam,* No. 28 Thn. VII (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 1996), 22. [↑](#footnote-ref-31)
32. Ibid., hal. 23 [↑](#footnote-ref-32)
33. Ibid., hal. 24 [↑](#footnote-ref-33)
34. Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 935. [↑](#footnote-ref-34)
35. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 1996), hal. 144. [↑](#footnote-ref-35)
36. Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet IV (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 107. [↑](#footnote-ref-36)
37. Ibid. [↑](#footnote-ref-37)
38. Moh Zahid, *Dua Puluh Lima tahun Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan,* (Jakarta: Departemen Agama R.I. Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, 2002), hal. 69-70. [↑](#footnote-ref-38)
39. Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1986), hal. 67 [↑](#footnote-ref-39)
40. Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia,* (Yogyakarta: Liberty, 1996), hal. 108 [↑](#footnote-ref-40)
41. R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita) , hal. 475 [↑](#footnote-ref-41)
42. Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia,* (Yogyakarta: Liberty, 1996),hal. 110 [↑](#footnote-ref-42)
43. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, cet I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hal. 140 [↑](#footnote-ref-43)
44. Ibid., hal. 141. [↑](#footnote-ref-44)
45. Kompilasi Hukum Islam, ( Bandung: Nuansa Aulia, 2008), hal. 80 [↑](#footnote-ref-45)
46. Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2000), hal. 70 [↑](#footnote-ref-46)
47. Muh. Nasib Ar Rifa’i, *Taisiru al Alliyul qadir li Ikhtishari Tafsir Ibnu Katsir, Riyadh: Maktabah Ma;arrif, 1989. Terjemahan, Syihabuddin,* (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), hal. 463 [↑](#footnote-ref-47)
48. Sayyid Quthb, *Fi Zhilalil Qur’an, Terjemahan As’ad Yasin, et al., “Tafsiar fi zhilalil Qur’an Di Bawah Naungan Al Qur’an*”, Jilid I, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hal. 296 [↑](#footnote-ref-48)
49. Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 121 [↑](#footnote-ref-49)
50. Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Di Indonesia*, hal. 168 [↑](#footnote-ref-50)
51. Mahfud MD, Kompetensi dan Struktur Organisasi Peradilan Agama*,* dalam: *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia,* (Yogyakarta: UII Press, 1993), 40. [↑](#footnote-ref-51)
52. Arto, H.A. Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. VIII, 2008), 44 [↑](#footnote-ref-52)
53. Achmad Fauzan, *Himpunan Undang-Undang Lengkap Tentang Badan Peradilan*, (bandung: CV. Yrama Widya, Cet. III, 2007), 212 [↑](#footnote-ref-53)
54. <http://pa-bitung.go.id/pages/profil-pejabat-struktural-pa-bitung-2018> [↑](#footnote-ref-54)
55. Penetapan berkas Nomor 66/Pdt.P/2019/PA.Bitg [↑](#footnote-ref-55)
56. Asmawati Sarib, S.Ag., Hakim Pengadilan Agama Bitung, 26 Mei 2020 [↑](#footnote-ref-56)
57. Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama (Yogyakarta:; Pustaka Pelajar, 1996), hal. 94 [↑](#footnote-ref-57)
58. Asmawati Sarib, S.Ag., Hakim Pengadilan Agama Bitung, *wawancara,* Bitung, 26 Mei 2020 [↑](#footnote-ref-58)
59. Jaih, Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005), 105. [↑](#footnote-ref-59)